



# **LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2017**

MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN





**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B.109 /M.PPN/SES/PR.04.02/02/2018 Jakarta, 27 Februari 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian PPN/  
Bappenas Tahun 2017

- 1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
- 2. Yth. Menteri Keuangan**
- 3. Yth. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas**  
di Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



*Bambang P.S. Brodjonegoro*  
Bambang P.S. Brodjonegoro

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TA 2017**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2017 sesuai dengan Pedoman Reviu Kementerian PAN dan RB atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas TA 2017 menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian PPN/Bappenas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja dan telah disajikan secara akuntabel. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2018

Inspektur Utama,



**Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si**

19671208 199203 1 002



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian PPN/Bappenas atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan kinerja ini juga merupakan suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

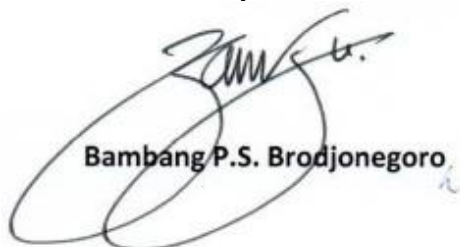
Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017, seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017.

Pencapaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2017 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian PPN/Bappenas serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi pemerintah, swasta. Namun capaian kinerja yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dan memberikan manfaat serta dapat meningkatkan kualitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas dimasa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bambang P.S. Brodjonegoro', written over a circular stamp or seal.

Bambang P.S. Brodjonegoro



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2017. Dalam rencana kinerja tahun 2017 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian sasaran strategis mencapai 99,70%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (98,54%).

Dalam rangka mencapai perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, beberapa pembenahan yang telah dilakukan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut: (1) terbitnya Permen No. 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018, (2) penyempurnaan rangkaian penyusunan rencana pembangunan, dengan menggunakan berbagai aplikasi e-planning (KRISNA, KARINA, SIMLARAS dll).

Secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan dalam pengelolaan keuangan, SDM dan kapasitas pengawasan. Langkah tindak lanjut yang sedang dilakukan saat ini, antara lain:

- a) Menyempurnakan proses bisnis dan cascading indikator kinerja dari level Menteri sampai dengan individu serta mekanisme pemantauannya.
- b) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam mensinkronkan berbagai program pembangunan yang lebih realistis dengan pihak terkait, terutama dengan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif;
- c) Meningkatkan kualitas sumber data dan informasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;
- d) Melakukan penyempurnaan rangkaian proses penyusunan rencana pembangunan agar lebih efektif dan efisien;
- e) Mengoptimalkan fungsi pengendalian program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan pencapaian sesuai target;
- f) Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANSASI .....	5
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	8
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	11
2.2 PENETAPAN KINERJA .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>16</b>
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	17
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	42
3.3 PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	42
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1 KESIMPULAN.....	47
4.2 REKOMENDASI.....	47
4.3 TINDAK LANJUT.....	47
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potensi dan Isu Strategis Kementerian PPN/Bappenas .....	9
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017 .....	13
Tabel 3	Peranan Unit Kerja Eselon I terhadap Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas .....	14
Tabel 4	Alokasi Anggaran Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 .....	15
Tabel 5	Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016-2017 .....	18
Tabel 6	Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas .....	19
Tabel 7	Capaian Kinerja Indikator Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah .....	22
Tabel 8	Proses Pelaksanaan Pencapaian Kesesuaian Muatan Rencana Pembangunan.....	23
Tabel 9	Pemetaan Kesesuaian Muatan RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019.....	24
Tabel 10	Pemetaan Kesesuaian Muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018 .....	26
Tabel 11	Pemetaan Kesesuaian Muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018.....	27
Tabel 12	Usulan Kegiatan Provinsi Pada Prioritas Nasional.....	29
Tabel 13	Capaian Indikator Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang Ditindaklanjuti KL.....	33
Tabel 14	Contoh Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2017 oleh K/L Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.....	33
Tabel 15	Capaian Nilai RB Tahun 2014-2016 .....	38
Tabel 16	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2013-2015.....	41
Tabel 17	Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017.....	42
Tabel 18	Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2017.....	43
Tabel 19	Kinerja Program Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas .....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas .....	5
Gambar 2	Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas .....	6
Gambar 3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Gambar 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	7
Gambar 5	Perbandingan Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dan Jabatan Tahun .....	8
Gambar 6	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	11
Gambar 7	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017 .....	12
Gambar 8	Capaian Kinerja Tahun 2017 .....	17
Gambar 9	Proses Penyusunan Perpres RKP 2018 .....	30
Gambar 10	Opini Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007-2016 .....	39
Gambar 11	Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan 2017 .....	43
Gambar 12	Penghargaan yang diterima Kementerian PPN/Bappenas .....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN



**LAPORAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
**2017**

MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

BADAN PERENCANAAN DAN

**BAPPENAS**

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai upaya telah dilakukan sejak tahap ke-1 RPJMN (2005-2009) dan RPJMN ke-2 (2010-2014) dan banyak memberikan hasil yang membawa perubahan. Sebagai keberlanjutan tahapan sebelumnya, tahap ke-3 RPJMN (2015-2019) dicanangkan dengan tujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Hal tersebut menjadi landasan bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dimasa mendatang.

Berkaitan tersebut diatas, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tujuan: (1) terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; (2) terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan RKP setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan dari Presiden atau Wakil Presiden dalam urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas. Pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan diupayakan terus untuk mendapatkan opini terbaik dari BPK. Disamping itu, melalui Program Reformasi Birokrasi, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten.

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas ini merupakan laporan hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahun 2017 dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang untuk mewujudkan prasyarat/kondisi perlu dimaksud. Pembahasan dalam laporan kinerja ini mencakup:



- 1) rencana strategis dan penetapan kinerja pada tahun 2017 dan dilaksanakan pada tahun 2018. Adanya perubahan/pergantian terkait kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, PP ini diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang selama ini dihadapi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), namun masih memerlukan banyak hal yang harus dilengkapi/disempurnakan.
- 2) akuntabilitas kinerja, yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas. Dalam bagian ini juga akan menguraikan mengenai realisasi anggaran dan penjelasan lain yang terkait.
- 3) bagian akhir laporan kinerja ini berisi rekomendasi yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan termasuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Pasal 2 (4), Kementerian PPN merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Sedangkan menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2, Kementerian PPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 3 Kementerian PPN menyelenggarakan fungsi:

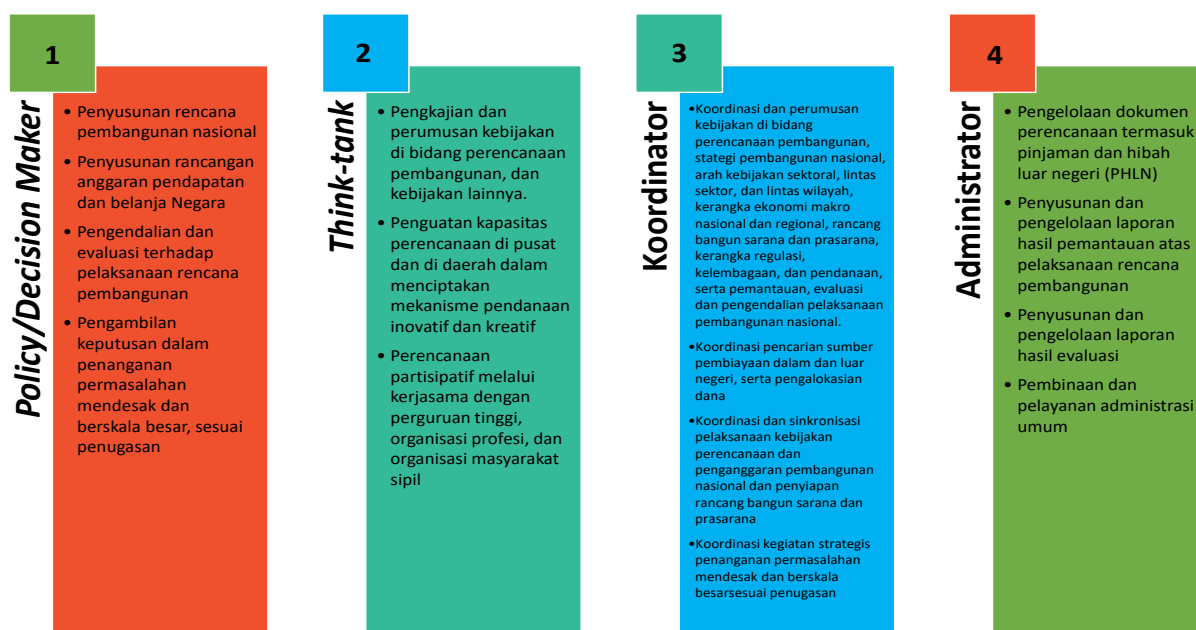
- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappenas mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan kementerian/lembaga/daerah;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan belanja negara;
- e. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, peran Kementerian PPN/Bappenas dikelompokkan menjadi empat bagian yang saling terkait. Peran tersebut adalah penyusun kebijakan (*policy maker*), *think-tank*, koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan administrator dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergi, dan kredibel. Ilustrasi peran dan fungsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas



Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015 – 2019

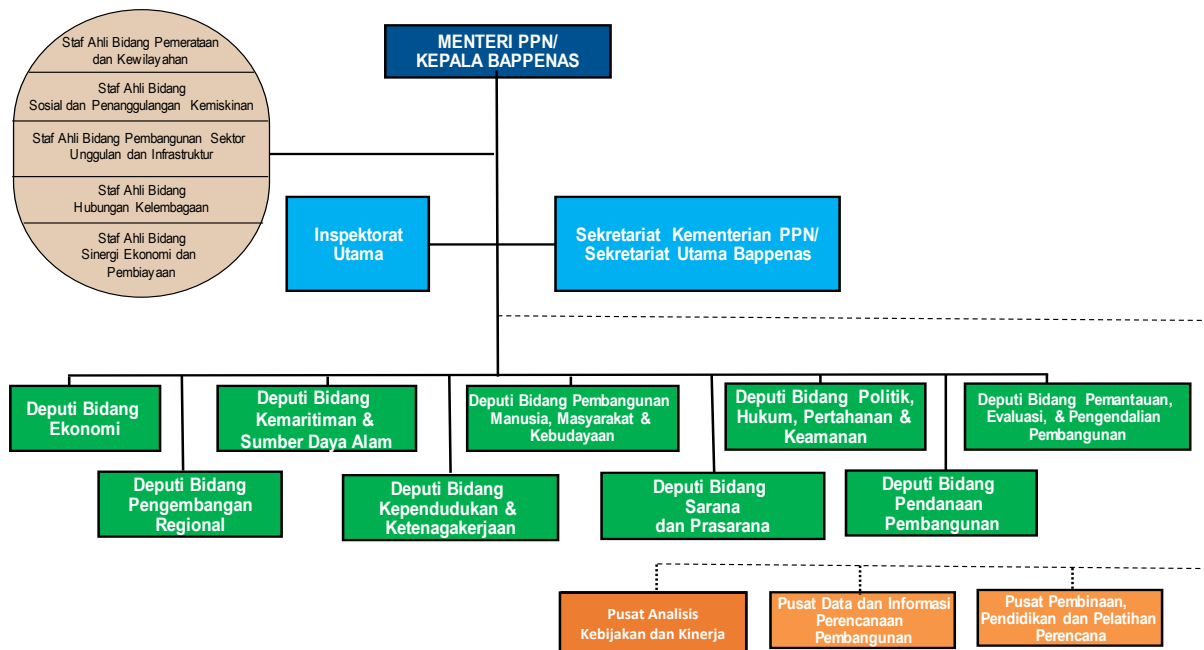
Sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 (sebagaimana telah diubah dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengorganisasian pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menggunakan unit organisasi Bappenas. Sesuai dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian pada pasal 21 disebutkan bahwa “Kementerian PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Bappenas.”

### 1.3 STRUKTUR ORGANSASI

Berdasarkan Perpres Nomor 20 Tahun 2016, secara umum struktur organisasi Bappenas adalah Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Inspektur Utama, 9 (sembilan) Deputi, dan 5 (lima) Staf Ahli yang bertugas melakukan koordinasi semua fungsi perencanaan pembangunan, termasuk juga fungsi yang bersifat lintas bidang dan pengarusutamaan seperti penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Untuk memperkuat fungsi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 3 (tiga) pusat, yaitu *pertama*, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), *kedua*, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang), dan *ketiga*, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja (PAKK). Struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2 Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas**



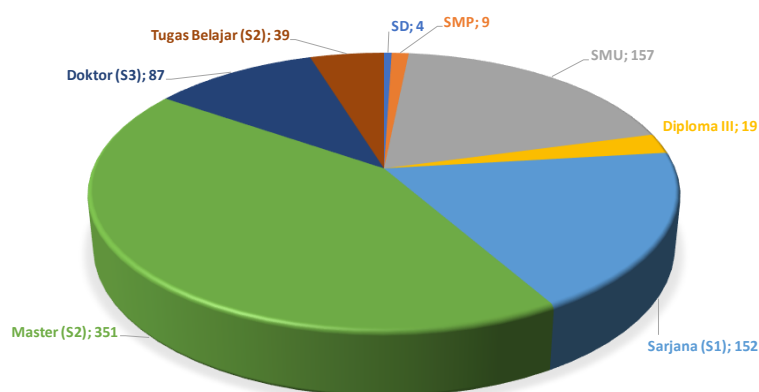
Sumber : Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2017

## 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk itu, kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas perlu terus ditingkatkan.

Pada tahun 2017 jumlah pegawai Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 818 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 37 orang (4,5%) dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 781 orang. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penambahan/penerimaan pegawai baru. Saat ini kualitas pegawai Kementerian PPN/Bappenas sangat baik, tercermin dari komposisi pegawai sebanyak 818 orang yang terdiri dari 87 orang (11%) berpendidikan Doktor (S3); 351 orang (43%) berpendidikan Master (S2), 152 orang (19%) berpendidikan Sarjana (S1), 189 orang (23%) berpendidikan Sarjana Muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD dan sisanya sebanyak 39 orang (4%) sedang tugas belajar (S2 maupun S3). Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

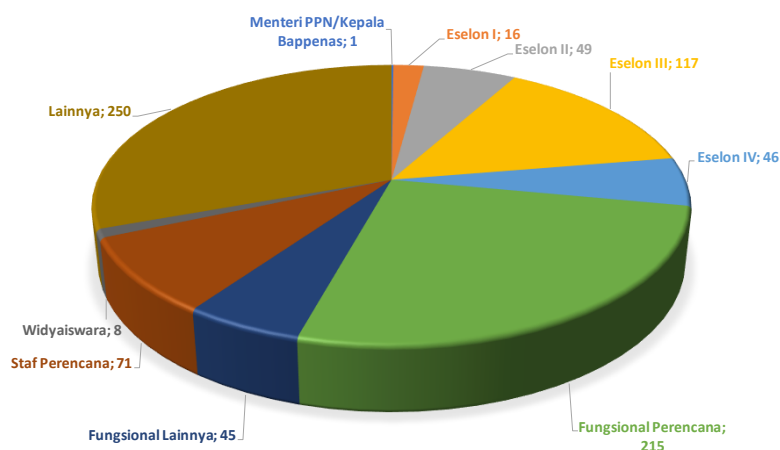
**Gambar 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, per 31 Desember 2017

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan terdiri dari 16 orang Pejabat Eselon I (2%), 49 orang Pejabat Eselon II (6%), 117 orang Pejabat Eselon III (14%), 46 orang Pejabat Eselon IV (6%), Fungsional Perencana 215 orang (26%), fungsional lainnya sebanyak 45 (6%) orang, staf perencana sebanyak 71 orang (9%), widyaiswara sebanyak 8 orang dan lainnya sebanyak 250 (31%). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.

**Gambar 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

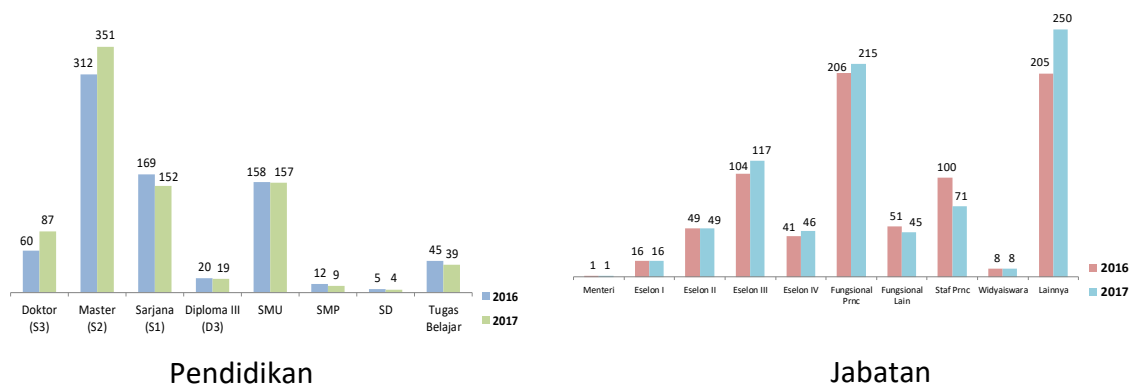


Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, per 31 Desember 2017

Perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada jenjang Pendidikan Doktor (S3) mengalami peningkatan sebanyak 27 orang (31%) dan jenjang Master (S2) sebanyak 39 orang (11,1%). Secara umum jumlah pegawai berdasarkan posisi jabatan, pada tahun 2017 tidak ada perubahan pada jabatan Pejabat Eselon I sebanyak 16 orang, Pejabat Eselon II sebanyak 49 orang, sedangkan yang mengalami penambahan adalah Pejabat Eselon III sebanyak 13 orang (11,1%), Pejabat Eselon IV sebanyak 5 orang (10,8%), Fungsional Perencana sebanyak 9 orang,

widyaiswara sebanyak 8 orang dan staf lainnya bertambah sebanyak 45 orang. Adapun yang mengalami pengurangan adalah fungsional lainnya sebanyak 6 orang, staf perencana sebanyak 29 orang. Selengkapnya perbandingan jumlah pegawai dapat dilihat pada Gambar 5.

**Gambar 5 Perbandingan Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dan Jabatan Tahun 2016 & 2017**



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, per 31 Desember 2017

Selama Tahun 2017, terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

- Pendelegasian tugas dan fungsi terhadap pejabat fungsional yang kurang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- Komposisi SDM belum ideal sesuai dengan kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
- Belum optimalnya sistem jalur karier, promosi, rotasi dan mutasi untuk mendorong motivasi kerja pegawai.

## 1.5 POTENSI DAN ISU STRATEGIS

Sehubungan terbitnya PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai kewenangan dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penugasan khusus dari Presiden/Menteri Koordinator. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindaklanjuti, antara lain dapat dilihat pada Tabel 1.



**Tabel 1 Potensi dan Isu Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

No	Uraian	Potensi	Isu/Permasalahan
1	PP No. 17 Tahun 2017	Memastikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh kementerian/lembaga/ daerah pada tahun 2017 untuk pelaksanaan di tahun 2018 sesuai dalam kerangka dan arahan pengembangan wilayah yang ada agar dapat terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya melakukan perubahan mendasar atas proses bisnis, sistem manajemen kinerja serta perangkat regulasi terutama berkaitan dengan penerapan PP Nomor 17 Tahun 2017</li> <li>- Memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang lebih intensif</li> </ul>
2	Penugasan khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantapan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</li> <li>- Pemetaan potensi daerah terkait pemindahan ibu kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memerlukan sumber daya yang lebih (SDM, dana, waktu dll)</li> <li>- Memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang lebih intensif</li> </ul>

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan penugasan khusus dari Presiden/Menteri Koordinasi diantaranya: a) koordinator pembenahan data pemerintah Indonesia, yang disebut "Satu Data Indonesia"; b) koordinator pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals); c) sekretariat pelaksanaan Komite Nasional Keuangan Syariah; d) pelaksana kajian pemindahan ibukota; e) Majelis Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF); f) *Millenium Challenge Account* Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas perlu mengantisipasi potensi dan permasalahan atas penambahan wewenang dan penugasan tersebut. Peran strategis dalam perencanaan dan penganggaran, pengendalian harus diimbangi dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualifikasi SDM, penyempurnaan kerangka regulasi dan didukung dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif.

Selain itu, ada beberapa portofolio penting dari Kementerian PPN/Bappenas antara lain: a) menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM) yang akan dituangkan setiap tahunnya di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP); b) menyusun Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) atau Blue Book, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) atau *Green Book*, Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH); c) mencari sumber pendanaan di luar APBN (Pembiayaan Investasi Non APBN - PINA); d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (RKP, RPJMN).

# BAB II

## RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA



**LAPORAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN **2017**

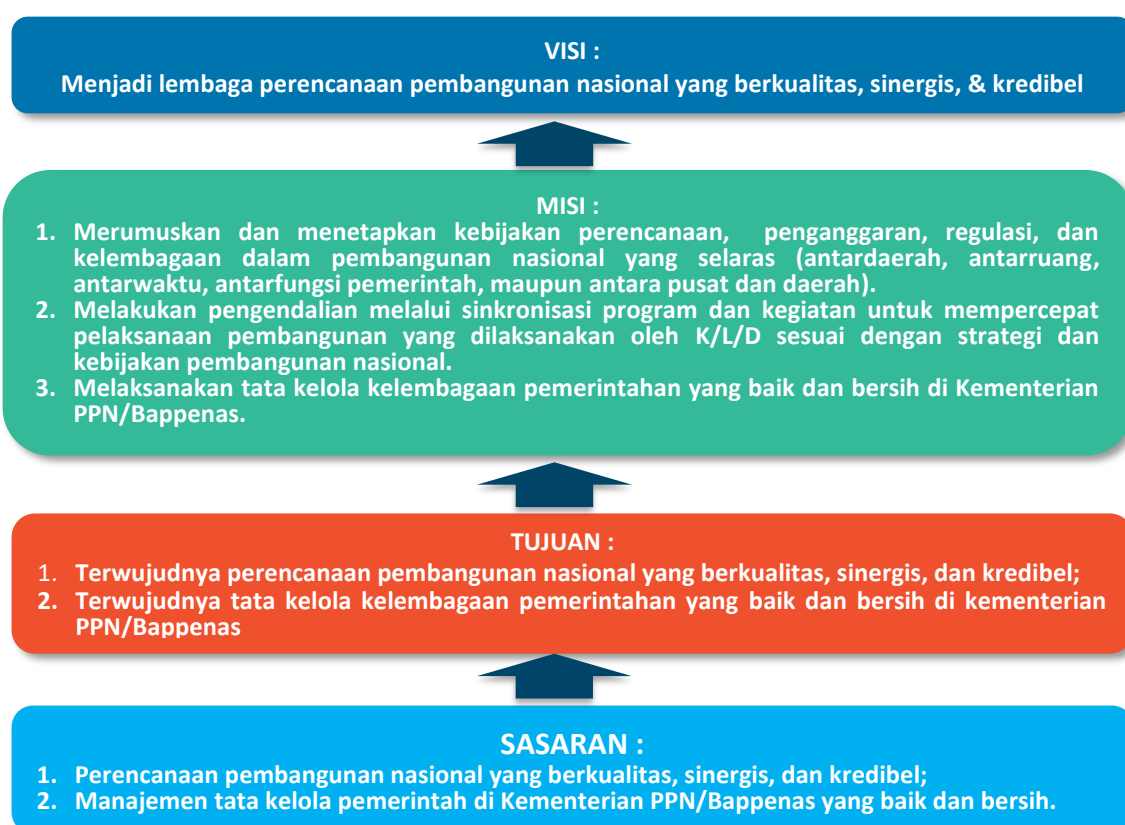
BADAN PERENCANAAN DAN

BAPPENAS

## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Gambar 6:

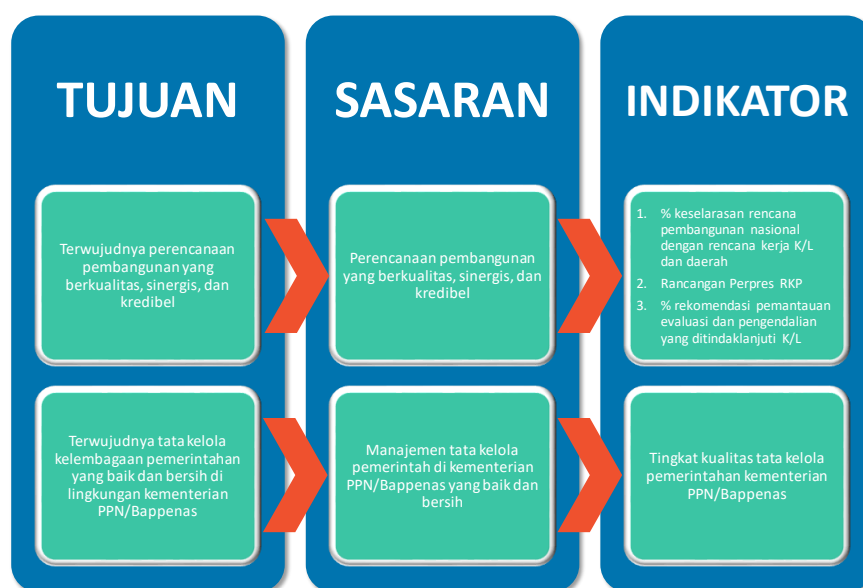
**Gambar 6 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**



Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan bersinergi. Rencana pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dapat dilihat dari: (i) kebijakan perencanaan pembangunan nasional, dan (ii) hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional (dalam bentuk RPJMN dan RKP) dijabarkan secara terintegrasi, sinkron, dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2017 dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2017



Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017

Dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyesuaikan struktur dan fungsi baru yang dituangkan dalam perubahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Perubahan tersebut menuntut Kementerian PPN/Bappenas berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang lebih berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan agenda pembangunan nasional.

Peran dan fungsi, sasaran, dan indikator dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 pada tahun 2017 mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas yang tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2016. Perubahan tersebut meliputi: (i) perubahan peran dan fungsi, (ii) penajaman sasaran strategis, dan (iii) penyempurnaan indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani.

## 2.2 PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penugasan tersebut sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang ada. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud



dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; (b) tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), keterkaitan (*relevant*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Bappenas tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2 Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
		2. Rancangan Perpres RKP 2018	1 dokumen
		3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2.	Manajemen tata kelola Pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017

### 2.3 CASCADING PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Kementerian PPN/Bappenas, seperti pada Tabel 2 diatas, setiap unit kerja Eselon I mempunyai peran masing-masing seperti rincian pada dalam Tabel 3.



**Tabel 3 Peranan Unit Kerja Eselon I terhadap Target dan Realisasi Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas**

Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	PMMK	Polhukhankam	Ekonomi	KSDA	Duknaker	Sarpras	Regional	Pendanaan	PEPP	Ses	Irtama	
Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Perencanaan Pembangunan Nasional	Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	-	
		1. (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN													
		2. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP													
		3. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP													
		4. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP													
		Rancangan Perpres RKP 2018	1 dokumen	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
		Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	
Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	1. Nilai RB		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	2. Opini BPK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
		3. Skor Evaluasi AKIP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	

Ket:

Pada Unit Kerja Eselon I terdapat indikator yang tidak terpetakan langsung dalam indikator kementerian, namun indikator tersebut menunjang pencapaian kementerian secara tidak langsung. Seperti : Deputi PEPP, Deputi Pendanaan, Deputi Pengembangan Regional, dan Setmen PPN/Settama Bappenas

Selanjutnya indikator kinerja Eselon I dijabarkan ke dalam indikator kinerja Eselon II dibawahnya dan sampai kepada individu. Penjabaran indicator kinerja ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi.

Contoh *cascading* indikator Menteri sampai dengan indikator kinerja UKE II dapat dilihat pada Lampiran 3.

## 2.4 ALOKASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2017 sebesar Rp.3.061.971.641.000,-, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 560.221.767.000,- dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp. 2.501.749.468.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan ke dalam 4 (empat) Program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas. Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kinerja manajemen internal (sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi) dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas ditujukan untuk mendukung peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional dengan sasaran kegiatan/indikator pencapaian persen tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ditujukan untuk memastikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
4. Program Perencanaan Pembangunan Nasional ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, dan Kebijakan Percepatan Pembangunan.

Alokasi anggaran berdasarkan program tersebut di atas secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4 Alokasi Anggaran Program Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017**

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		
		RM	PHLN	TOTAL
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	281.892.638	-	281.892.638
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.533.100	-	38.533.100
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	3.583.282	-	3.583.282
4	Perencanaan Pembangunan Nasional	236.212.747	2.501.749.468	2.737.962.621
<b>JUMLAH</b>		<b>560.221.767</b>	<b>2.501.749.468</b>	<b>3.061.971.641</b>

Anggaran pada tahun 2017 tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis dan lintas bidang/sector serta difokuskan pada penyiapan perumusan kebijakan perencanaan antara lain melalui kegiatan kajian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KERJA**



**LAPORAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN **2017**

BADAN PERENCANAAN DAN

**BAPPENAS**

### 3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan analisis capaian kinerja organisasi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja (Tabel 2) yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun.

Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan *logical framework* dalam menilai hasil capaian kinerja, dan didukung dengan aplikasi *e-Performance* sebagai sistem pelaporan dan penilaian mandiri masing-masing unit kerja dan individu (Sasaran Kerja Pegawai/SKP). Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Gambar 8.

**Gambar 8 Capaian Kinerja Tahun 2017**



The screenshot shows the 'e-Performance' dashboard for the Minister of PPN/Bappenas. The dashboard displays the following information:

- Dashboard** Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabil
- Pilih Unit Kerja**: Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Menteri PPN/Kepala Bappenas**
- Capaian Indikator Kinerja Utama**

#	IKU	Progress
1	Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	99.70%
2	Rancangan Perpres RKP 2018	1 Dokumen
3	Persentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
4	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Sumber : aplikasi e-performance.bappenas.go.id

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcome dan output pada Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, penilaian capaian IKU merupakan agregat dari capaian kinerja pada Unit Kerja Eselon I. Capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016-2017, dapat dilihat pada Tabel 5:

**Tabel 5 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016-2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah	100%	98,54%	100%	99,70
		2. Rancangan Perpres RKP 2018	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%	100%	100%	100%
2	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik	Baik	Baik	Baik

Capaian kinerja tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016. Keselarasan muatan RKP dan RKPD merupakan faktor penyumbang peningkatan kinerja pada tahun ini. Selain itu, komitmen pimpinan serta segenap jajaran dan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya peningkatan kinerja yang dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017 juga merupakan faktor pendorong peningkatan kinerja secara internal. Meskipun ada peningkatan pencapaian kinerja, namun untuk tahun selanjutnya tetap perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Hasil capaian kinerja tersebut dapat tercermin dalam capaian kinerja unit kerja eselon I Kementerian PPN/Bappenas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6 Capaian Kinerja Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas

Indikator Kinerja	Deputi Bidang																	
	PMMK (%)		Sarpras (%)		Polhukhankam (%)		Ekonomi (%)		KSDA (%)		Duknaker (%)		Pendanaan (%)		PEPP (%)		Regional (%)	
	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/ Lembaga/ Daerah	100	100	100	100	100	94,58	100	100	100	100	100	93,00	100	100	-	-	100	99,70
1. Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dan RPJMN	100	100	100	100	100	99,50	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100
2. Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP	100	100	100	100	100	98,88	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100
3. Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP	100	100	100	100	100	96,54	100	100	100	100	97,50	97,50	100	100	-	-	100	100
4. Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	98,82
Rancangan Perpres RKP 2017	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	1 dok	100	-	-	1 dok	100
Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100	100	100	100	100	97,14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95,56

## Keterangan:

(T) Target ; (C) Capaian

Melalui pemetaan substansi program dan sasaran dengan 3 kriteria, Terpetakan Langsung (TL), Terpetakan Tidak Langsung (TTL), dan Tidak Terpetakan (TT). Renja K/L dan Rancangan Awal RKP dianggap selaras apabila memenuhi kriteria TL dan TTL.

## SASARAN STRATEGIS 1

### Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel

Sasaran strategis perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel diwujudkan dengan mengimplementasikan penyusunan dokumen perencanaan yang menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan visi misi dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

Berbagai perubahan sistem penyusunan RKP telah mulai dikembangkan sejak pendekatan THIS diluncurkan pada tahun 2016, antara lain dengan adanya *bilateral meeting*, *multilateral meeting* dan terakhir perubahan mekanisme pengalokasian dan penetapan pagu anggaran. Untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarnya, proses perencanaan secara elektronik (*e-planning*) telah didukung oleh beberapa aplikasi perencanaan antara lain: KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); KARINA (Kerangka Regulasi Nasional); SIMLARAS (Sistem Informasi Manajemen Penyelarasan); SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu) dan E-monev merupakan sistem pemantauan pelaksanaan Renja-KL.

Penilaian pencapaian sasaran strategis 1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Uraian capaian dari masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

## SASARAN STRATEGIS 1

### INDIKATOR 1.1

(%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah

Capaian indikator ini berasal dari 4 indikator yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I, yaitu: a) % keselarasan muatan RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019; b) % keselarasan muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018; c) % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 2018 dan d) % keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP. Keempat pengukuran ini berasal dari indikator unit kerja Eselon I dan dibobot secara merata.

Untuk mengukur indikator kinerja utama, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang termuat dalam RKP, RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L. Hasil pemetaan akan dinilai dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Kriteria terpetakan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
  - Terpetakan Langsung (TL), adalah program, sasaran, kegiatan dan indikator yang terkait langsung atau sama persis baik nomenklatur, substansi ataupun target/volume
  - Terpetakan Tidak Langsung (TTL), adalah adalah program, sasaran, kegiatan dan indikator yang tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume terkait;
2. Kriteria Tidak Terpetakan (TT), adalah program, sasaran, kegiatan dan indikator yang tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit.

Capaian masing-masing indikator yang mendukung (%) keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7 Capaian Kinerja Indikator Keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah**

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Prosentase (%) keselarasan muatan RKP dan RPJMN	100%	100%	100	
2	Prosentase (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP	100%	100%	100	
3	Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L dengan RKP	100%	100%	100	
4	Prosentase (%) keselarasan muatan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP	80%	79,85%	98,82	
<b>TOTAL</b>				<b>99,70</b>	

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

 90% - 100%       80% - <90%       <80%

Untuk keselarasan muatan RKP – RPJMN, Renja K/L – RKP, dan RKA K/L – RKP telah mencapai 100% sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%. Sedangkan untuk keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP mencapai 79,85% (sehingga capaian 98,82%). Kementerian PPN/Bappenas memandang target untuk daerah tidak terlalu tinggi karena mempertimbangkan adanya beberapa usulan kegiatan yang menjadi prioritas daerah bukan merupakan prioritas nasional, sehingga RKPD tidak selaras, belum optimalnya penggunaan 100% dengan RKP. Secara keseluruhan hasil penilaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 98,54% menjadi 99,70%.

Tercapainya kesesuaian muatan prioritas nasional, isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran program antara rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah sangat didukung oleh evaluasi internal unit kerja. Evaluasi internal tersebut ditunjukkan oleh beberapa proses yang perlu ditempuh dalam rangka menjaga kesesuaian muatan tersebut, antara lain melalui proses (a) koordinasi intensif di internal Bappenas (*workshop* internal dan pertemuan lainnya), (b) rapat koordinasi teknis/rakortek dengan K/L dan Pemerintah Daerah, (c) *Multilateral Meeting*, (d) *Bilateral Meeting*, (e) Musrenbangnas, (f) *Trilateral Meeting*, (g) forum penelaahan, dan (h) rapat koordinasi lainnya. Adapun penjabaran proses untuk menjaga kesesuaian tersebut secara lebih rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 8 .

**Tabel 8 Proses Pelaksanaan Pencapaian Kesesuaian Muatan Rencana Pembangunan**

TW I	TW II	TW III	TW IV
Telah dilaksanakan beberapa kegiatan koordinasi melalui pertemuan/rapat baik diinternal Kemen. PPN/Bappenas maupun eksternal dengan melibatkan KL. Pertemuan/Rapat yang dilaksanakan seperti Workshop Internal, Rakortek K/L dengan Pemerintah Daerah, Rakorbangpus, dan Bilateral Meeting. Dalam Triwulan I juga dihasilkan Rancangan Awal RKP 2018.	Sebagai kelanjutan dari kegiatan penyusunan RKP Tahun 2018, pada TW II telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti Multilateral Meeting, Trilateral Meeting, serta kegiatan Musrenbangnas Tahun 2017. Pada TW II telah dihasilkan Rancangan RKP Tahun 2018. Selain itu, juga disepakati Pagu Indikatif TA 2018 melalui Surat Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu. Serta dilaksanakan Rapat Pendahuluan bersama DPR RI terkait RKP 2018.	RKP Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2017. Pada TW III ini juga sudah mulai dilakukan tahapan penelaahan RKA KL melalui Aplikasi KRISNA.	Telah dilaksanakan penelaahan Renja KL melalui Krisna dan RKA KL untuk menjaga keselarasan target-target PN sebagaimana tercantum dalam RKP 2018. Dalam TW 4 ini juga disusun Daftar Proyek Prioritas yang selaras dengan RKP 2018.

Adapun penjelasan capaian (%) keselarasan Rencana Pembangunan Nasional dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga/Daerah masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**a. % keselarasan muatan dengan RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019**

Indikator kinerja bertujuan untuk mengukur keselarasan muatan RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019. Keselarasan muatan diukur melalui pemetaan keterkaitan antara muatan RPJMN 2015-2019 dan muatan RKP 2018. Muatan yang dimaksud adalah sasaran pokok pembangunan nasional, arah kebijakan dan program. Pada prinsipnya muatan RPJMN bersifat lebih umum dan luas, sementara muatan RKP pada tiap tahapnya menjabarkan muatan RPJMN secara lebih konkrit dan detail, bisa dalam bentuk rumusan yang sama namun dengan jabaran yang lebih spesifik. Perbedaan kebijakan pembangunan tidak akan mengubah secara total, namun lebih kepada upaya penguatan/fokus kebijakan, seringkali jumlah program/kegiatan pada RKP tidak sama dengan yang tercantum dalam RPJMN, sehingga dalam pemetaannya bisa bersifat langsung maupun tidak langsung.

Sumber data yang digunakan untuk pemetaan adalah dokumen RPJMN 2015-2019 dan dokumen RKP 2018. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dalam penyusunannya telah melibatkan seluruh sektor dan seluruh tingkatan pemerintahan dalam rangka mencapai sinkronisasi dan sinergi. Pelibatan tersebut dilakukan melalui serangkaian rapat-rapat koordinasi termasuk juga melalui kegiatan rapat koordinasi pembangunan pusat (rakorbangpus), musyawarah perencanaan pembangunan provinsi (musrenbangprov), dan musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas). Untuk memastikan keselarasan antara RKP dan RPJMN dilakukan reviu secara bersama-sama antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran dan program yang dicanangkan dalam RPJMN benar-benar dilaksanakan di

kementerian dan lembaga. Kesepakatan dituangkan dalam dokumen kesepakatan tiga pihak dan selanjutnya dijadikan acuan bagi masing masing pihak untuk menyesuaikan.

Berdasarkan hasil analisis, secara umum muatan RKP 2018 sudah merupakan penjabaran dari RPJMN 2015-2019. Namun ada beberapa catatan bahwa terdapat beberapa sasaran program dan/atau program yang ada di RKP 2018 memetakan tidak langsung sasaran program dan/atau program yang ada di RPJMN 2015-2019 karena adanya perubahan nomenklatur maupun penambahan jumlah sasaran program dan/atau program akibat penyesuaian perubahan struktur organisasi pada beberapa K/L pelaksana sehingga sasaran program dan/atau program dalam RKP 2018 beberapa diantaranya berbeda secara nomenklatur dan beberapa lainnya terdapat penggabungan maupun terjabarkan menjadi lebih detail dari sasaran program dan/atau program pada RPJMN 2015-2019. Terjadinya perbedaan jumlah juga disebabkan karena tidak semua sasaran program dan/atau program yang ada di RPJMN 2015-2019 dilaksanakan pada tahun pelaksanaan RKP 2018.

Keselarasn muatan dengan RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2018}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RPJMN}} \times 100\%$$

Adapun hasil pemetaan beberapa UKE I terkait kesesuaian muatan RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019 disajikan dalam Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9 Pemetaan Kesesuaian Muatan RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019**

Deputi	Muatan		Penilaian			% Kesesuaian Muatan
	RKP	RPJMN	TL	TTL	TT	
PMMK	151	132	137	14	0	100
Regional	57	82	44	13	0	100
Kemaritiman dan SDA	74	69	67	7	0	100
Sarana Dan Prasarana	54	76	50	4	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>336</b>	<b>359</b>	<b>298</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Capaian kinerja organisasi diukur dengan melihat kesesuaian muatan prioritas nasional/bidang, isu strategis, arah kebijakan, program, sasaran/program antara RKP 2018 terhadap muatan RPJMN 2015-2019. Pengukuran indikator kesesuaian muatan antara dokumen RKP 2018 dengan RPJMN 2015-2019 ini berguna untuk melihat pencapaian sasaran pembangunan, yakni tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya. Secara umum aspek prioritas nasional/bidang, isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran program antara RKP 2018 dan RPJMN 2015-2019 sudah berada dalam koridor yang sama,



meskipun dalam beberapa muatan kesesuaian tidak tertulis secara eksplisit. Selain itu, aspek sasaran untuk mencapai prioritas nasional pada RKP 2018 sudah sejalan dan mendukung pencapaian sasaran dalam periode RPJMN 2015-2019. Penyesuaian muatan dalam aspek-aspek tersebut dilakukan melalui proses musrenbang, pertemuan bilateral, pertemuan multilateral, pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*), dan koordinasi intensif dengan K/L mitra.

**b. % Keselarasan muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018**

Indikator kinerja % keselarasan muatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2018 dengan RKP 2018 ini dimaksudkan untuk mengukur keselarasan muatan (program dan sasaran) dari Renja K/L tersebut dengan prioritas pembangunan dalam RKP 2018. Pengukuran indikator keselarasan dilakukan dengan cara menyandingkan program dan sasaran yang tercantum di dalam Renja K/L mitra kerja dengan program dan sasaran yang ada di dalam RKP 2018.

Kesesuaian muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran Renja KL 2018}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2018}} \times 100\%$$

Pada prinsipnya muatan pada Renja K/L tahun 2018 merupakan penjabaran dan kebijakan yang ada dalam RKP Tahun 2018 untuk dilaksanakan oleh K/L pada tahun yang sama. Proses penyusunan Renja K/L 2018 sudah mengacu pada dokumen RKP 2018. Upaya pencapaian target keselarasan dilakukan melalui: a) *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sebagai upaya penyalarsan arah kebijakan pembangunan berikut dengan anggarannya; b) pencermatan Renja K/L sebagai upaya penyempurnaan substansi dan penyalarsan Renja K/L dengan RKP 2018.

Keselarsan muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018 dilakukan untuk menjaga konsistensi rencana kerja tahunan dan Renja-KL dengan cara berkoordinasi dengan mitra kerja K/L. Penyesuaian dan penyalarsan Renja K/L dengan RKP dan pagu indikatif dilakukan melalui mekanisme *trilateral meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait. Hasil *trilateral meeting* berupa dokumen kesepakatan tiga pihak yang menjadi acuan K/L terkait dalam menyusun Renja K/L agar sejalan dan sesuai dengan sasaran dan target RKP.

Berdasarkan pemetaan antara muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018, tingkat kesesuaian muatan telah mencapai 100%. Hasil penyalarsan antara Renja K/L dengan RKP 2018 secara umum menunjukkan sasaran program dan/atau program pada Renja K/L telah memetakan muatan RKP 2018 baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun hasil

pemetaan beberapa UKE I terkait kesesuaian muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018 disajikan pada Tabel 10.

**Tabel 10** Pemetaan Kesesuaian Muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018

Deputi	Muatan		Penilaian			% Kesesuaian Muatan
	Renja	RKP	TL	TTL	TT	
PMMK	207	197	174	23	0	100
Regional	337	312	226	86	0	100
Kemaritiman dan SDA	74	74	74	0	0	100
Sarana Dan Prasarana	181	75	62	13	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>799</b>	<b>658</b>	<b>536</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

Indikator kinerja ini telah mencapai 100% karena hasilnya telah terakomodasi dalam dokumen *trilateral meeting* antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga sebagai mitra kerja dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2018. Sinkronisasi, harmonisasi antara RKP dengan Renja-KL telah terlaksana seluruhnya yang ditunjukkan oleh selesainya dokumen anggaran masing-masing K/L mitra yang dibuktikan dengan adanya dokumen kesepakatan *trilateral meeting*. Selain itu, adanya PP No. 17/2017 yang mengharuskan K/L menyampaikan Renja melalui aplikasi KRISNA, maka % keselarasan muatan Renja K/L 2018 dengan RKP 2018 dapat tercapai.

Dalam pencapaian muatan antara Renja K/L dengan RKP masih terdapat beberapa kendala diantaranya: a) Adanya kebijakan/arahan/direktif presiden yang dikeluarkan di periode setelah RKP diterbitkan, sehingga kebijakan/arahan/direktif tersebut belum tertuang dalam RKP namun harus diterjemahkan dalam Renja K/L, b) Kegiatan prioritas K/L tidak tertuang dalam dokumen RKP 2018, meskipun pencapaiannya mendukung prioritas pembangunan nasional; dan c) Adanya perubahan alokasi anggaran K/L di tahun berjalan yang berakibat pada perubahan indikator dan output K/L namun K/L tidak melakukan perbaikan/penyesuaian Renja.

### c. % Keselarasan muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018

Indikator kinerja % keselarasan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2018 dengan RKP 2018 merupakan penjabaran dari rancangan Renja K/L 2018 yang mengacu pada rancangan RKP 2018. Pengukuran keselarasan muatan rancangan RKA K/L 2018 lebih mudah dilakukan dengan adanya PP Nomor 17 Tahun 2017 dan aplikasi KRISNA, karena K/L tidak dapat melakukan perubahan RKA-KL dilakukan dengan cara menganalisis dan menyandingkan muatan program dan sasaran RKA K/L dengan

RKP 2017 sesuai dengan bidang/isu strategis masing-masing. Hal ini dapat mengindikasikan efektivitas pengalokasian anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan prioritas.

Kesesuaian muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKA KL 2018}}{\Sigma \text{ Program dan Sasaran RKP 2018}} \times 100\%$$

Kesesuaian tersebut dapat dijelaskan dengan hasil pemetaan atau reviu berdasarkan pemetaan muatan program dan sasaran RKP yang dijabarkan dalam RKA KL. Berdasarkan pemetaan antara muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018, tingkat kesesuaian muatan telah mencapai 100%. Secara umum muatan RKA K/L sudah merupakan penjabaran dari RKP 2018. Ada beberapa sasaran program dan/atau program yang ada di RKA K/L memetakan langsung dan tidak langsung sasaran program dan/atau program yang ada di dalam RKP 2018 karena adanya perubahan nomenklatur maupun penambahan jumlah sasaran program dan/atau program akibat penyesuaian perubahan struktur organisasi maupun perubahan anggaran pada beberapa K/L pelaksana sehingga sasaran program dan/atau program dalam RKA K/L beberapa diantaranya berbeda secara nomenklatur dan beberapa lainnya terdapat penggabungan maupun terjabarkan menjadi lebih detail dari sasaran program dan/atau program pada RKP 2018.

**Hasil pemetaan beberapa UKE I terkait Kesesuaian Muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018 dapat dilihat pada Tabel 11.**

**Tabel 11 Pemetaan Kesesuaian Muatan RKA K/L 2018 dengan RKP 2018**

Deputi	Muatan		Penilaian			% Kesesuaian Muatan
	RKA KL	RKP	TL	TTL	TT	
PMMK	61	61	61	0	0	100
Regional	337	312	226	86	0	100
Kemaritiman dan SDA	74	74	74	0	0	100
Sarana Dan Prasarana	42	22	22	0	0	100
<b>Jumlah</b>	<b>514</b>	<b>469</b>	<b>383</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber: LKj UKE I, data pemetaan lengkap ada pada masing-masing UKE I

Keterangan: TL= Terpetakan Langsung; TTL= Terpetakan Tidak Langsung; TT=Tidak Terpetakan

#### **d. % Kesesuaian RKP Provinsi 2017 dengan RKP 2017**

Sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Nasional (Musrenbangnas) yang ditujukan untuk membahas dan menyempurnakan rancangan awal dokumen perencanaan melalui

sinkronisasi rencana kerja kementerian/lembaga di pusat dengan usulan pendanaan dan kegiatan dari daerah. Salah satu tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang dijabarkan melalui salah satu indikator kinerja, yaitu “persentase keselarasan RKPD Provinsi 2018 dengan RKP 2018”. Adapun perhitungan yang digunakan adalah persentase jumlah pemerintah daerah (Provinsi) yang menyampaikan usulan kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Nasional RKP 2018 melalui aplikasi e-Musrenbang dengan jumlah lokasi (Provinsi) yang diprioritaskan di tiap Prioritas Nasional RKP 2018 dalam aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU).

Pada tahun 2017 telah dilakukan tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan menggunakan pendekatan *money follow program* yang kemudian diterjemahkan melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan pendekatan substantif secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Sebagai bentuk penyelarasan perencanaan tahunan antara pusat dan daerah, maka ke-10 Prioritas Nasional RKP 2018 juga menjadi acuan dalam pengusulan kegiatan oleh daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui aplikasi e-Musrenbang. Jumlah Provinsi yang menyampaikan usulan kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Nasional RKP 2018 melalui aplikasi e-Musrenbang yang sesuai jumlah lokasi (Provinsi) yang diprioritaskan di tiap Prioritas Nasional RKP 2018 dalam aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU) menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan tahunan pusat (RKP) dan daerah (RKPD Provinsi) sebesar 98,82%. Hal ini dikarenakan beberapa usulan kegiatan yang menjadi prioritas daerah bukan merupakan prioritas nasional, sehingga RKPD tidak dapat selaras 100 persen dengan RKP.

(%) keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKP =

$$\text{Persentase (\%) keselarasan } PN_n = \left[ \frac{\sum \text{Provinsi Mengusulkan } PN_n}{\sum \text{Provinsi Lokus Prioritas } PN_n} \right]$$

dimana n = Total jumlah Prioritas Nasional yaitu 10 Prioritas Nasional

Secara rinci perhitungan di masing-masing Prioritas Nasional RKP 2017 terkait jumlah Provinsi yang menyampaikan usulan kegiatan kepada pusat dan lokasi provinsi prioritas di tiap-tiap Prioritas Nasional dapat dilihat pada Tabel 12.

**Tabel 12 Usulan Kegiatan Provinsi Pada Prioritas Nasional**

No	Prioritas Nasional	Provinsi Lokus PN	Provinsi Mengusulkan PN	%
1	Pendidikan	34	33	97,06
2	Kesehatan	34	34	100
3	Perumahan dan Permukiman	34	33	97,06
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	34	33	97,06
5	Ketahanan Energi	34	34	100
6	Ketahanan Pangan	34	34	100
7	Penanggulangan Kemiskinan	34	34	100
8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	34	34	100
9	Pembangunan Wilayah	34	34	100
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	34	33	97,06
<b>Jumlah</b>				<b>98,82</b>

Sebagai bentuk penyelarasan perencanaan tahunan antara pusat dan daerah, maka ke-10 Prioritas Nasional RKP 2018 juga menjadi acuan dalam pengusulan kegiatan oleh daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui aplikasi e-Musrenbang. Jumlah Provinsi yang menyampaikan usulan kegiatan yang sesuai dengan Prioritas Nasional RKP 2018 melalui aplikasi e-Musrenbang yang sesuai jumlah lokasi (Provinsi) yang diprioritaskan di tiap Prioritas Nasional RKP 2018 dalam aplikasi Sistem Informasi Multilateral (SIMU) menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan tahunan pusat (RKP) dan daerah (RKPD Provinsi) sebesar 98,82%.

**INDIKATOR  
1.2**
**SASARAN STRATEGIS 1**
**Rancangan Perpres RKP Tahun 2018**

Capaian indikator ini diukur dari proses penyusunan rancangan peraturan tentang RKP 2018.

Untuk menghasilkan Rancangan Dokumen RKP Tahun 2018 yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah dilaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Rancangan dokumen RKP 2018 tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari berbagai tahapan, yaitu: (a) koordinasi intensif di internal Bappenas (workshop internal



dan pertemuan lainnya), (b) sidang kabinet (c) rapat koordinasi teknis/rakortek dengan K/L dan Pemerintah Daerah, (d) *Multilateral Meeting*, (e) *Bilateral Meeting*, (f) Musrenbangnas, (g) *Trilateral Meeting*, (h) forum penelaahan, dan (i) rapat koordinasi lainnya. Pembahasan di dalam Musrenbangnas melibatkan berbagai K/L serta pemerintah provinsi dalam pembahasan 10 prioritas nasional (PN). Finalisasi RKP 2018 mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya dilakukan juga pelaksanaan *trilateral meeting* dengan Kementerian Keuangan untuk disahkan menjadi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL).

RKP 2018 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP 2018 ini telah dimulai dari tahun 2016 dan membutuhkan waktu hingga pertengahan tahun 2017 sebelum akhirnya disahkan menjadi Peraturan Presiden. Proses penyusunan RKP 2018 dapat dilihat pada Gambar 9.

**Gambar 9 Proses Penyusunan Perpres RKP 2018**



Sumber : Paparan Rapim Penyusunan RKP 2018

Pencapaian indikator kinerja ini adalah 100% dengan diterbitkannya Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Berbeda dengan proses penyusunan RKP tahun sebelumnya, RKP Tahun 2018 disusun sudah mengacu kepada ketentuan baru yaitu PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan PP tersebut beberapa proses perencanaan dan penganggaran sudah sempurna dan sinkron, termasuk dengan

menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan aplikasi KRISNA. Perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, terintegrasi/sinergi, dan berbasis spasial kewilayahan (THIS), dengan mengedepankan *money follow program* sehingga membutuhkan koordinasi untuk meningkatkan keterpaduan antar-K/L, antar-sektor serta penajaman agar anggaran memang dialokasikan untuk Prioritas Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 ini merupakan pedoman bagi:

- a. Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan pemerintah dari turunannya;
- b. Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Pedoman ini sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga dengan DPR. Selanjutnya Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga yang berisi uraian tentang sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan pendanaannya.
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

## SASARAN STRATEGIS 1

### INDIKATOR 1.3

(%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti ini berasal dari : aplikasi e-monev (PP Nomor 39 Tahun 2006), evaluasi paruh waktu dan hasil pemantauan dan evaluasi unit kerja terhadap mitranya

Dalam rangka meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan fungsi pengendalian kebijakan pembangunan nasional, dilakukan pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional

dilaksanakan dalam rangka pengawasan sekaligus mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional agar dapat dilakukan dengan tepat waktu. Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang harus ditindaklanjuti oleh K/L.

Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L diukur dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dibagi jumlah rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti K/L tahun 2017. Adapun hasil capaian indikator rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti KL dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13 Capaian Indikator Rekomendasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang Ditindaklanjuti KL**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Status Capaian
Bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan	100%	100%	100%	●
Bidang sarana dan prasarana	100%	100%	100%	●
Bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	100%	100%	100%	●
Bidang ekonomi	100%	100%	100%	●
Bidang kemaritiman dan SDA	100%	100%	100%	●
Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	100%	100%	100%	●
Bidang pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	●
Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	100%	100%	100%	●
Bidang pengembangan regional	100%	100%	100%	●

Sumber : LKJ Unit Kerja Eselon I, data lengkap ada pada masing-masing UKE I

Sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, di bawah ini disampaikan contoh analisisnya sebagaimana Tabel 14.

**Tabel 14 Contoh Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2017 oleh K/L Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan**

No	Bidang	Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian Oleh K/L	Keterangan
1	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Penguatan upaya promotif preventif lintas sektor dan lintas instansi perlu ditunjang dengan adanya regulasi yang berlaku terutama dalam menghadapi kondisi prevalensi penyakit tidak menular yang semakin meningkat sehingga salah satu dampaknya adalah meningkatnya rasio klaim BPJS Kesehatan	Pada Bulan Februari 2017 telah ditetapkan Instruksi Presiden tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang menginstruksikan seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya dalam pencegahan penyakit dan upaya promotif kesehatan. Selain itu Germas juga sudah diintegrasikan dalam dokumen RKP serta Rencana Kerja K/L tahun 2018.	Ditindaklanjuti KL
		Pelaksanaan Nusantara Sehat perlu ditingkatkan dengan adanya sosialisasi pada perguruan tinggi kesehatan terutama jurusan kedokteran karena masih rendahnya	Sosialisasi Nusantara Sehat telah terdapat dalam komponen anggaran kegiatan dalam BPPSDMK Kementerian Kesehatan sehingga dilakukan di Perguruan Tinggi kesehatan yang menjadi sasaran. Selain itu tenaga dokter yang mendaftar dalam Nusantara Sehat tahun 2017 lebih	Ditindaklanjuti KL

No	Bidang	Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengendalian Oleh K/L	Keterangan
		tingkat ketertarikan lulusan kedokteran untuk menjadi peserta Nusantara Sehat. Selain itu perlu juga dipertimbangkan system insentif yang dapat menarik ketertarikan tenaga medis	banyak dibandingkan tahun sebelumnya	
		Badan POM perlu meningkatkan infrastruktur dan SDM-nya serta memberikan kemudahan registrasi produk agar bisa mengimbangi kecepatan inovasi dari industri. Selain itu, terkait regulasi perlu ditinjau lebih lanjut apabila memang perlu direvisi untuk dapat memperkuat kelembagaan Badan POM	Penguatan Badan POM selaras dengan Peraturan Presiden tahun 2017 tentang Badan POM yang didalamnya mencakup penguatan kelembagaan Badan POM serta upaya lintas sektor termasuk peran daerah dalam penguatan fungsi pengawasan obat dan makanan.	Ditindaklanjuti KL
2	Direktorat Pendidikan dan Agama	Meningkatkan kesadaran kementerian untuk mengisi e-monev Bappenas	Kemdikbud dan Kemenag melakukan koordinasi pengisian e-monev secara rutin dan lengkap	Ditindaklanjuti KL
		Capaian Midterm RPJMN bidang Pendidikan masih on track, namun masih perlu beberapa langkah percepatan di beberapa hal sehingga target 2019 benar-benar dapat tercapai	Penyusunan RKP 2018 disesuaikan dengan gap target 2019 yang harus dicapai	Ditindaklanjuti KL
		Penertiban biro travel haji dan umrah Pelatihan petugas haji Perbaikan catering untuk jamaah haji	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi	Ditindaklanjuti KL
3	Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan	Adanya kebutuhan untuk melakukan revitalisasi secara menyeluruh pada Desa Adat Tarung di Kab. Sumba Barat Daya, NTT. Desa adat tersebut perlu direvitalisasi karena terbakar habis. Direktorat PTIK telah menyampaikan surat rekomendasi atas hasil pemantauan desa adat tersebut kepada Ditjen Kebudayaan Kemendikbud	Ditjen Kebudayaan merasa berkepentingan untuk melaksanakan rekomendasi ini dan telah menindaklanjuti dengan mereviu mekanisme pendanaan yang memungkinkan untuk melakukan revitalisasi dengan nilai yang cukup Besar.	Ditindaklanjuti KL
		Direktorat PTIK merekomendasikan pembuatan Road Map Pengembangan STP kepada LPNK	LPNK menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan penyusunan road map pada 2018	Ditindaklanjuti KL
		Hasil evaluasi Direktorat PTIK terhadap pelaksanaan beasiswa Bidikmisi salah satunya adalah perlunya tambahan cakupan biaya terkait asuransi kesehatan.	Dalam beberapa kesempatan pertemuan, Ditjen Belmawa Kemristekdikti telah menyepakati akan adanya cakupan biaya terkait	Ditindaklanjuti KL
4	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga	Adanya advokasidan KIE telah meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dan penundanaan usia kawin pertama bagi remaja.	Advokasi dan KIE bagi remaja melalui Genre telah dilakukan oleh BKKBN dengan materi kesehatan reproduksi remaja dan penundanaan usia kawin pertama bagi remaja dalam bentuk Genre Kit.	Ditindaklanjuti KL
		Materi advokasi dan konseling sebaya remaja disesuaikan dengan isu-isu strategis kekinian yang dihadapi remaja saat ini	BKKBN sedang mengembangkan materi advokasi yang disesuaikan dengan isu-isu strategis kekinian terkait remaja	Ditindaklanjuti KL
		P2TP24 sebagai unit pelayanan terpadu sangat membantu dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut didukung oleh surat edaran untuk memastikan setiap desa memiliki pusat layanan berbasis komunitas (PATBM) atau lembaga layanan korban berbasis desa yang didukung oleh anggaran desa.	KPPPA sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelayanan terpadu korban kekerasan.	Ditindaklanjuti KL

## SASARAN STRATEGIS 2

### Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik & bersih

Tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu unsur kunci dalam mencapai visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan tujuan kedua dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas adalah “Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih”, dengan indikator kinerja berupa “Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas”. Pencapaian atas indikator ini dilakukan secara bersama-sama oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (setmen PPN/Settama Bappenas) dan Inspektorat Utama.

### INDIKATOR 2.1

## SASARAN STRATEGIS 2

### Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas

Masing-masing dari penilaian ini dibobot secara merata sehingga didapat nilai dan dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = < 70%)

Untuk mengukur capaian atas indikator “Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas”, terdapat 3 (tiga) ukuran yang dijadikan dasar yaitu: (1) Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, (2) Opini atas Laporan Keuangan; dan (3) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Ketiga ukuran tersebut merupakan ukuran yang dinilai oleh pihak eksternal dan berlaku secara nasional, dimana ukuran (1) dan (3) dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) dan ukuran (2) dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, upaya pencapaian keberhasilan untuk ketiga ukuran tersebut telah dilakukan melalui berbagai layanan peningkatan kinerja manajemen internal dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas dalam bentuk program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Kementerian



PPN/Bappenas serta program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Pengembangan dan penentuan kegiatan pada masing-masing program dilakukan dengan mengacu antara lain pada kebutuhan organisasi dan kriteria dari 3 (tiga) pengukuran tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian oleh KemenPAN dan RB dan BPK di tahun 2017, capaian atas indikator telah memenuhi target yaitu Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas adalah sangat baik. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian ini sama dengan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**a. Nilai Reformasi Birokrasi K/L**

**Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Salah satu kondisi perlu dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sesuai amanat dalam Nawacita butir 2 dalam RPJMN 2015-2019. Reformasi Birokrasi bertujuan membangun pemerintahan berbasis kinerja dan pemerintahan dinamis. Capaian atas tujuan tersebut ditunjukkan dengan terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, serta mampu memenuhi public needs dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Reformasi Birokrasi pada seluruh aspek perubahan sejak tahun 2008 dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019. Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas selama tujuh tahun terakhir telah membuahkan hasil bagi peningkatan kualitas manajemen kinerja Kementerian PPN/Bappenas, serta telah memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Dengan adanya penguatan mandatory kepada Kementerian PPN/Bappenas, maka penyusunan perencanaan telah diupayakan menghasilkan produk perencanaan dengan lebih presisi, mencakup penajaman arah kebijakan, ketersediaan resources envelope dan skema pendanaan yang jelas, regulasi yang harmonis dan tidak tumpang tindih, serta kejelasan K/L/D yang menjadi PJ dan Pelaksana Program.

Dalam rangka menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang kredibel dan tercapainya sasaran Reformasi Birokrasi, maka dilakukan penguatan kerangka kebijakan RB Kementerian PPN/Bappenas, utamanya kedalam aspek manajemen perubahan, kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi, serta pengendalian internal. Berikut ini adalah

capaian utama atas fokus kebijakan pelaksanaan RB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kembali *Quick Wins* RB yang bersifat instansional dan berdampak langsung terhadap kualitas penyusunan perencanaan pembangunan, serta penguatan peran Agen Perubahan dalam internalisasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Pengembangan dan penataan regulasi melalui sistem aplikasi harmonisasi peraturan, sistem evaluasi peraturan partisipatif & pembangunan sistem bill tracking;
- 3) Pemetaan dan penataan proses bisnis melalui pengorganisasian penataan program dan kegiatan serta perumusan kebijakan e-gov terintegrasi, a.l: e-planning, SATU DATA, serta Sistem Informasi Kearsipan Dinamis;
- 4) Pengembangan cascading kinerja unit kerja s.d level individu, serta monev kinerja berbasis elektronik e-performance;
- 5) Pelaksanaan Kebijakan Promosi terbuka JPT Madya (6 jabatan) dan JPT Pratama (25 Jabatan), serta perumusan *Human Capital Development Plan 2018-2025*;
- 6) Penguatan terhadap pengawasan intern melalui peningkatan level IACM (Level 3), pelaksanaan telaah sejawat dengan nilai BAIK, dan pengawalan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran;
- 7) Peningkatan kualitas layanan publik melalui perbaikan kualitas perencanaan (HITS dan *Money follow Program*), peningkatan layanan diklat dengan pengembangan WIFAST dan SIPENA);
- 8) Mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan selama 8 tahun berturut-turut.;
- 9) Mendapatkan beberapa penghargaan seperti terbaik ke-3 pelaksanaan rekrutmen CPNS dari BKN *Award*, penghargaan di bidang IT, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dan penghargaan pelayanan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan RB bukan hanya membentuk sistem yang lebih baik tetapi yang lebih penting membentuk karakter dan mind set dari orang-orang yang terlibat didalamnya. Kegiatan RB telah memberikan dampak positif kepada organisasi seperti peningkatan performansi pegawai, transparansi sistem rekrutmen dan kenaikan jabatan, akuntabilitas keuangan, efektivitas sistem pemerintahan melalui e-government terintegrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

### **Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi**

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian PPN/Bappenas melalui mekanisme *self-assessment* secara online telah dilaksanakan sejak tahun 2015. PMPRB dilaksanakan dengan memanfaatkan, mengolah dan menganalisa data dan informasi, materi dan dokumen pendukung dari masing-masing unit kerja penanggung jawab area perubahan, yang meliputi proses persiapan, pelaksanaan, serta capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2017, hasil *self-assessment* pelaksanaan RB

adalah sebesar 90,24. Nilai tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 91,25, karena beberapa pertimbangan bahwa terdapat beberapa area perubahan yang memerlukan penguatan dan komitmen seluruh jajaran untuk memperbaikinya sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disepakati.

Selanjutnya, hasil *self-assessment* pelaksanaan RB tersebut divalidasi oleh Tim Evaluasi RB Nasional, Kementerian PAN dan RB. Hasil sementara penilaian RB Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017 oleh Tim Kementerian PAN dan RB telah disampaikan dalam forum exit meeting pada 18 Januari 2018, namun hasil penilaian secara resmi belum disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan saat ini. Secara umum, implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan apresiasi dari Tim Kementerian PAN dan RB dan terdapat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 78,16 menjadi 79,14 (hasil sementara). Pencapaian Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas selama 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 15 dibawah ini.

**Tabel 15 Capaian Nilai RB Tahun 2014-2016**

KOMPONEN	Nilai Maks	2015		2016		2017	
		Self-Ass	Eksternal	Self-Ass	Eksternal	Self-Ass	Eksternal*
<b>A. PENGUNGKIT</b>							
Manajemen Perubahan	5,00	5,00	3,84	5,00	3,95	4,93	4,18
Penataan Peraturan Per-UU	5,00	4,38	3,13	5,00	3,13	5,00	3,13
Penataan & Penguatan Organisasi	6,00	6,00	4,83	6,00	5,00	6,00	3,84
Penataan Tatalaksana	5,00	4,26	3,60	4,75	3,76	4,42	3,76
Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	14,11	11,30	14,22	12,23	14,46	13,07
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	6,00	5,80	4,35	5,80	4,39	6,00	4,83
Penguatan Pengawasan	12,00	11,59	7,64	11,65	8,29	11,46	9,18
Peningkatan Pelayanan Publik	6,00	6,00	4,25	6,00	4,50	5,75	4,60
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>	<b>60,00</b>	<b>57,12</b>	<b>42,92</b>	<b>58,42</b>	<b>45,25</b>	<b>58,03</b>	<b>46,59</b>
<b>B. HASIL</b>							
Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja	20,00	15,33	15,56	15,56	16,42	16,42	15,62
Pemerintah Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,84	8,30	9,27	8,72	8,72	8,89
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,83	8,00	8,00	7,77	7,78	8,01
<b>TOTAL HASIL</b>	<b>40,00</b>	<b>34,99</b>	<b>31,86</b>	<b>32,82</b>	<b>32,91</b>	<b>32,92</b>	<b>32,55</b>
<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI</b>	<b>100</b>	<b>92,11</b>	<b>74,78</b>	<b>91,25</b>	<b>78,16</b>	<b>90,94</b>	<b>79,14</b>

Ket : \* hasil exit meeting (masih menunggu surat resmi dari Kemen. PAN dan RB)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa tren hasil penilaian Tim Evaluasi RB Nasional secara total meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini artinya pembenahan tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, penataan regulasi serta pengendalian internal telah memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap pencapaian hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan tersebut tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan peran dan tugasnya dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

## b. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian PPN/Bappenas atas pelaksanaan APBN. Laporan Keuangan tersebut merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan 36 (tiga puluh enam) satuan kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) satuan kerja kantor pusat (Bappenas, MCC, dan ICCTF) dan 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Laporan Keuangan selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan, serta membantu dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2016 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut berarti: (i) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (ii) laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas telah menerapkan akuntansi berbasis akrual, (iii) keandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini WTP pada tahun ini masih dalam penilaian BPK, namun Kementerian PPN/Bappenas telah meraih opini WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut sejak tahun 2008. Perkembangan opini laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 10.

**Gambar 10 Opini Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007-2016**



Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa capaian atas pengukuran ini tidak mudah karena nilai anggaran dan jumlah satker yang dikelola semakin meningkat yang berarti tantangan dan kompleksitas proses pertanggungjawaban anggaran juga semakin meningkat. Opini WTP ini dicapai melalui kerja keras, upaya perbaikan secara terus-menerus, serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas dan Inspektorat Utama. Setmen PPN/Settama Bappenas telah bekerja keras dalam hal pengelolaan manajemen kelembagaan, manajemen kinerja, pelayanan kelembagaan dan pelayanan anggaran. Upaya ini kemudian didukung dengan adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran dan kinerja tersebut, antara lain melalui reviu atas laporan keuangan dan pendampingan pengelolaan anggaran.

Opini WTP merupakan hal yang sangat penting karena memberikan gambaran tingkat kewajaran dan akuntabilitas pengelolaan dana publik yang terwujud pada suatu laporan keuangan. Untuk mempertahankan opini tersebut Kementerian PPN/Bappenas harus dapat melakukan perbaikan proses manajemen dan menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK atas kelemahan-kelemahan yang ada.

### **c. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan implementasi atas SAKIP dengan melaksanakan perencanaan strategis, penetapan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Pada tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah perbaikan dalam implementasi SAKIP, utamanya terkait pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta pelaporan kinerja.

Di tahun 2017, aplikasi e-performance yang telah dikembangkan di tahun sebelumnya dengan tujuan memantau perkembangan/mengukur kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah diperbaharui. Pembaharuan terhadap aplikasi e-performance merupakan hasil kerjasama dari berbagai unit kerja utamanya Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana serta Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Beberapa poin pembaharuan yang dilakukan antara lain terkait akses aplikasi menggunakan single sign on (SSO), penambahan fitur preview dokumen, kolom pengisian data yang lebih lengkap, serta pencantuman perjanjian kinerja.

Sementara terkait pelaporan kinerja, koordinasi penyusunan laporan kinerja unit kerja dan kementerian telah dilakukan sejak triwulan ke 3 (tiga) 2017. Koordinasi juga dilakukan dengan lebih intensif, proses penyusunan LKj melibatkan perwakilan unit kerja yang lebih luas,



serta telah dilakukan upaya penguatan komitmen pimpinan dalam supervisi penyusunan laporan kinerja (LKj). Tim penyusunan telah ditetapkan melalui SK Tim penyusun LKj yang terdiri dari staf, pejabat eselon III dan pejabat eselon II. Staf dan pejabat eselon III menjalankan peran sebagai penyusun LKj unit kerja dan pejabat eselon II menjalankan peran sebagai koordinator penyusunan LKj tersebut. Pemilihan tim telah dilakukan sesuai dengan usulan dari masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan implementasi SAKIP secara umum, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan berbagai upaya peningkatan dalam hal revidi dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan Inspektorat Utama. Revidi dan evaluasi kinerja di level unit kerja dilakukan antara lain melalui koordinasi internal unit kerja dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan input informasi kinerja dalam aplikasi e-performance. Selain itu, Inspektorat Utama juga melakukan revidi dan evaluasi di tahun 2017 sesuai tugas dan fungsinya berupa Revidi Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 dan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Setmen PPN/Settama Bappenas sebagai koordinator implementasi SAKIP melibatkan Inspektorat Utama dalam keseluruhan proses penyusunan LKj di tahun 2017. Hal ini dilakukan dengan tujuan Inspektorat dapat memberikan masukan terkait langkah perbaikan yang perlu dilakukan unit kerja dan Setmen PPN/Settama Bappenas berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang dilakukan.

Di akhir tahun 2017, Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas keseluruhan proses implementasi SAKIP di Kementerian PPN/Bappenas serta seluruh upaya perbaikannya. Evaluasi dilakukan baik terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, evaluasi internal, maupun capaian kinerja. Berdasarkan penilaian tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat BB atau sangat baik dengan nilai 76,23. Jika dibandingkan dengan hasil penilaian tahun lalu, hasil penilaian tahun 2017 berada pada klasifikasi penilaian yang sama. Perbandingan hasil evaluasi SAKIP tahun 2013-2016 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 16 berikut.

**Tabel 16 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Tahun 2013-2015**

No	Komponen yang dinilai	Tahun			
		2013	2014	2015	2016*
I.	Predikat	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
II.	Komponen yang dinilai				
1	Perencanaan Kinerja	26,23	26,39	23,73	NA
2	Pengukuran Kinerja	13,52	14,88	17,64	NA
3	Pelaporan Kinerja	10,96	11,66	12,46	NA
4	Evaluasi Internal	6,58	7,52	7,88	NA
5	Capaian Kinerja	14,78	14,74	14,42	NA
	Nilai hasil evaluasi	<b>72,07</b>	<b>75,19</b>	<b>76,13</b>	<b>76,23</b>

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014, adanya perubahan kategori: AA (>90-100); A(>80-90); BB(>70-80); B(>60-90); CC(>50-60), C(>30-50), D(>0-30)

Ket : \* hasil penilaian sementara oleh Kemen. PAN dan RB

Nilai atas evaluasi SAKIP Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 belum disampaikan secara resmi melalui surat dan detail penilaian per komponen penilaian juga belum disampaikan, namun berdasarkan hasil exit meeting evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017 nilai Kementerian PPN/Bappenas adalah 76,23 sebagaimana tercantum dalam tabel di atas. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan, namun masih pada kategori penilaian yang sama yaitu BB. Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas akan terus melakukan upaya perbaikan, utamanya terkait sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja, antara lain: a) penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya; b) penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan core business Kementerian PPN/Bappenas sesuai perubahan tersebut; c) penyempurnaan aplikasi e-performance; dan d) memperhatikan hasil rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 3.061.971.641.000,-, dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 2.976.505.484.543,- atau sekitar 97,21%. Rincian realisasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 yang terbagi dalam 4 (empat) Program sebagaimana pada Tabel 17.

**Tabel 17 Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017**

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI					
		RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	281.892.638	-	281.892.638	266.762.267	94,63	-	-	266.762.267	94,63
2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	38.533.100	-	38.533.100	37.197.108	96,53	-	-	37.197.108	96,53
3	Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas	3.583.282	-	3.583.282	3.481.074	97,15	-	-	3.481.074	97,15
4	Perencanaan Pembangunan Nasional	236.212.747	2.501.749.468	2.737.962.621	223.183.838	94,48	2.445.881.195	97,77	2.669.065.033	97,48
<b>JUMLAH</b>		<b>560.221.767</b>	<b>2.501.749.468</b>	<b>3.061.971.641</b>	<b>530.624.289</b>	<b>94,72</b>	<b>2.445.881.195</b>	<b>97,77</b>	<b>2.245.322.660</b>	<b>97,21</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Bappenas, Tahun 2017

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp. 49,15 miliar berupa belanja barang. Penghematan anggaran tersebut sesuai dengan Inpres No. 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Persandingan realisasi Anggaran tahun 2016 dan 2017 dilihat pada Tabel 18.

**Tabel 18 Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2017**

(dalam ribu)

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN		REALISASI			
		2016	2017	2016	%	2017	%
1	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	256.198.344	281.892.638	234.910.496	91,69	266.762.267	94,63
2	Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	36.736.617	38.533.100	35.331.7780	96,18	37.197.108	96,53
3	Program Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas	3.714.725	3.583.282	3.652.229	98,32	3.481.074	97,15
4	Perencanaan Pembangunan Nasional	1.613.951.600	2.737.962.621	1.571.648.201	97,38	2.669.065.033	97,48
<b>JUMLAH</b>		<b>1.940.425.123</b>	<b>3.061.971.641</b>	<b>1.845.542.706</b>	<b>95,11</b>	<b>2.976.505.484</b>	<b>97,21</b>

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum,

Realisasi anggaran tahun 2017 mencapai 97,21%, capaian tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2016, yaitu 95,11%. Persandingan capaian realisasi anggaran antara tahun 2016 dan tahun 2017 dilihat pada Gambar 11.

**Gambar 11 Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2016 dan 2017**



Sedangkan capaian kinerja output tahun 2017 dari masing-masing program Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19 Kinerja Program Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

Program	Tujuan	Output Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan perencanaan pembangunan;</li> <li>2. Menyiapkan sistem dan regulasi perencanaan dan pengendalian pembangunan;</li> <li>3. Penyajian informasi hasil pelaksanaan pembangunan;</li> <li>4. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur perencana pusat dan daerah untuk menghasilkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rencana pembangunan nasional jangka menengah;</li> <li>2) rencana pembangunan jangka pendek (tahunan);</li> <li>3) menyusun kebijakan percepatan pembangunan nasional</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Perumusan Kebijakan dan Rencana Pembangunan Nasional</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional</li> <li>• Penyusunan RKP 2018</li> <li>• Penyusunan kebijakan dan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional</li> <li>• Peningkatan kerjasama dengan negara lain/organisasi internasional (bilateral dan multilateral)</li> <li>• Penyusunan <i>Green Book</i>, <i>PPP Book</i>, dan analisis kelayakan investasi infrastruktur</li> <li>• Penyusunan kajian kebijakan</li> </ul> <p><b>Pelaksanaan Kebijakan dan Rencana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional</li> <li>• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas rencana pembangunan nasional</li> <li>• Koordinasi pelancaran &amp; percepatan pelaksanaan RPJMN &amp; RKP</li> <li>• Penetapan cakupan pengendalian dengan pihak eksternal (KSP, BPKP, dan Bappenas)</li> <li>• Penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden</li> </ul> <p>Penguatan Perencanaan Pusat dan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kelembagaan Bappeda (kapasitas aparatur dan perencanaan daerah)</li> <li>• Peningkatan kemampuan penyusunan perencanaan daerah</li> </ul>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelibatan pemangku kepentingan melalui Musrenbangnas, forum konsultasi publik, dan berbagai <i>Focus Group Discussion</i> dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;</li> <li>2. Melaksanakan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian, organisasi kelembagaan kehumasan; pelayanan penyusunan produk hukum dan ketatalaksanaan, perencanaan, pemantauan dan evaluasi; peningkatan kerjasama kelembagaan perencanaan; dan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Penguatan data pembangunan</li> <li>• Telaahan peraturan perundangan</li> <li>• Penguatan IT dalam proses perencanaan (antara lain: telekonferensi, musrenbang virtual)</li> </ul>
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Untuk memfasilitasi pembangunan gedung kantor untuk menambah kapasitas ruang kerja, pembangunan gedung arsip, rehabilitasi gedung kantor, peremajaan fasilitas kerja dan perbaikan utilitas gedung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi Gedung</li> <li>• Penyiapan perluasan gedung/kantor</li> <li>• Peremajaan kendaraan operasional kantor</li> </ul>
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	Untuk memperkuat fungsi pengawasan internal lembaga Kementerian PPN/Bappenas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan kegiatan Kemen. PPN/Bappenas (assurance)</li> <li>• Konsultasi terhadap unit kerja</li> <li>• Monitoring tindak lanjut rekomendasi</li> </ul>

### 3.3 PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Adapun prestasi Kementerian PPN/Bappenas terkait dengan Kinerja Kelembagaan pada Tahun 2016, antara lain: mendapatkan penghargaan dari Pemerintah atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah serta mendapatkan predikat opini WTP; mendapatkan penghargaan Anugerah KASN Tahun 2017; PNPB Awards 2017; Kapabilitas APIP Level 3 dari BPKP.

Pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas berhasil memperoleh berbagai penghargaan sebagaimana terdapat pada Gambar 12.

Gambar 12 Penghargaan yang diterima Kementerian PPN/Bappenas





# **BAB IV**

## **PENUTUP**



**LAPORAN KINERJA**  
**KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**  
MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN **2017**

BADAN PERENCANAAN DAN

**BAPPENAS**

## 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2017 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2017. Dalam rencana kinerja tahun 2017 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian sasaran strategis mencapai 99,70%, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (98,54%).

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1: Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/ Daerah, mencapai 98,82%. Hal ini dikarenakan beberapa usulan kegiatan yang menjadi prioritas daerah bukan merupakan prioritas nasional, sehingga RKPD tidak dapat selaras 100 persen dengan RKP.
  2. Rancangan Perpres RKP 2018, tercapai 100% dengan terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP Tahun 2018;
  3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L, telah mencapai 100%.
- B. Sasaran Strategis 2: Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih
- Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/ Bappenas, telah tercapai dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari perolehan Opini WTP dari BPK, Nilai RB yang mencapai 79, 14 (hasil evaluasi sementara) dan Nilai SAKIP mencapai 76,13 (nilai sementara).

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2017, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja, antara lain:

- a) Meningkatkan sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam mensinkronkan berbagai program pembangunan yang lebih realistis dengan pihak terkait, terutama dengan pemerintah daerah melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif;

- b) Meningkatkan kualitas sumber data dan informasi perencanaan pembangunan dengan menerapkan teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;
- c) Melakukan penyempurnaan rangkaian proses penyusunan rencana pembangunan agar lebih efektif dan efisien;
- d) Mengoptimalkan fungsi pengendalian program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan pencapaian sesuai target;
- e) Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar lebih efektif dalam mengawal perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana

### 4.3 TINDAK LANJUT

Kami menyadari bahwa kinerja Kementerian ini masih belum sempurna, untuk itu pada tahun 2018 ini sedang dilakukan penyempurnaan manajemen kinerja Kementerian dengan melakukan *Cascading* Indikator Kinerja Utama hingga level individu dan menetapkan Indikator Kinerja yang bersifat *outcome*.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat lebih *elaboratif* dan operasional untuk pembangunan ke depan.

# LAMPIRAN





## Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Prof. Bambang PS Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D  
Jabatan : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2017

Menteri PPN/Kepala Bappenas 

  
Prof. Bambang PS Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah	100%
		2. Rancangan Perpres RKP 2018	1 dokumen
		3. Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L	100%
2.	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas	Baik

Program	Anggaran
1. Program Utama Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp1.050.858.258.000,00
2. Program Pendukung:	
1. Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas	Rp268.909.700.000,00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp37.000.000.000,00
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp4.000.000.000,00

Jakarta, 13 Januari 2017

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Bappenas

  
 Prof. Bambang PS Brodjonegoro, SE, MUP, Ph.D

## Lampiran 2 Kamus Indikator

<b>1.</b>	<b>Judul Indikator</b>	<b>Prosentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah</b>
	Tujuan	Tergambarnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
	Definisi Operasional	Rencana pembangunan nasional adalah keselarasan indikator dan sasaran pada masing-masing dokumen perencanaan yang diukur dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (%) keselarasan muatan RKP dengan RPJMN</li> <li>2. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP</li> <li>3. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga (K/L) dengan RKP</li> <li>4. (%) keselarasan muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RKP</li> </ol>
	Formula	$= \sum(\text{muatan RKP} - \text{RPJMN} \times \text{bobot}) + (\text{muatan Renja} - \text{RKP} \times \text{bobot}) + (\text{muatan RKL} - \text{RKP} \times \text{bobot}) + (\text{muatan RKP} - \text{RKPD} \times \text{bobot})$ <p>Masing-masing indikator dibobot secara merata</p>
	Target	100%
	Sumber Data	Dokumen RKP 2018, Dokumen RPJMN 2015-2019, Renja K/L, RKA K/L, RKPD
	Pengumpul Data	Unit Kerja Eselon I/II di bidang perencanaan sektoral, regional yang mengawal perencanaan pembangunan
	<b>2.</b>	<b>Judul Indikator</b>
Tujuan		Tersusunnya dokumen Rancangan Perpres RKP 2018
Definisi Operasional		Rancangan Perpres RKP adalah rancangan akhir RKP sebelum ditetapkan menjadi RKP
Formula		Tersusunnya dokumen Rancangan Perpres RKP 2018 yang sesuai dan tepat sasaran dengan lingkup bidangnya
Target		1 dokumen (100%)
Sumber Data		Dokumen Rancangan Perpres RKP 2018
Pengumpul Data		Unit Kerja Eselon I/II di bidang perencanaan sektoral, pendanaan, ekonomi, dan regional

3.	<b>Judul Indikator</b>	Prosentase (%) rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L
	Tujuan	Tergambarnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel dan tepat sasaran melalui pemenuhan rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian lingkup bidangnya
	Definisi Operasional	Rekomendasi merupakan hasil dari pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dilakukan di tahun sebelumnya dan ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun berikutnya.
	Formula	$= \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sesuai bidangnya}}{\sum \text{keseluruhan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pada tahun 2018 sesuai bidangnya}} \times 100\%$
	Target	100%
	Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E-monev (PP 39 Tahun 2006)</li> <li>- Laporan Pemantauan dan Pengendalian, Laporan Evaluasi</li> <li>- Laporan midterm</li> </ul>
	Pengumpul Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja Eselon I/II di bidang perencanaan sektoral yang melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian output PN</li> <li>• Unit Kerja Eselon I/II di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap capaian outcome PN.</li> </ul>
4.	<b>Judul Indikator</b>	Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas
	Tujuan	Terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Kementerian PPN/Bappenas
	Definisi Operasional	Diukur dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nilai RB</li> <li>2 Opini BPK</li> <li>3 Skor Evaluasi AKIP</li> </ol>
	Formula	$= \sum (\text{nilai RB} \times \text{bobot}) + (\text{opini BPK} \times \text{bobot}) + (\text{Skor AKIP} \times \text{bobot})$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masing-masing indikator dibobot secara merata</li> <li>- Dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh. (Baik Sekali = 91 - 100%; Baik = 81 - 90%; Cukup baik = 71 - 80%; Kurang baik = &lt; 70%)</li> </ul>
	Target	Baik
	Sumber Data	Nilai RB K/L, Hasil opini BPK, Nilai Evaluasi SAKIP
	Pengumpul Data	Unit kerja di lingkungan Setmen PPN/Settama Bappenas, Inspektorat Utama





# **LAPORAN KINERJA** **KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS** MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN **2017**

